



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS KESEHATAN
RSUD PONDOK AREN

Jalan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15221,
Telepon (021) 73492962, Faksimile (021) 73492962,
Pos-el rsudpondokaren@tangerangselatankota.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PONDOK AREN

Nomor: 400.7.1/4017/SK.20/RSUDPA/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445.1/003/2022
TENTANG PENETAPAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PONDOK AREN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONDOK AREN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- b. bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren Nomor 445.1/003/2022 tentang Penetapan Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 445.1/003/2022 tentang Penetapan Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Menteri Kesehatan 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1197) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 49);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi E-Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1635);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1614);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1752);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1058);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
41. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1152);
42. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;
43. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang standar kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;
44. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
45. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/1131/2023 tentang Petunjuk Teknik Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi;
46. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) Tahun 2022;

47. Instruksi Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Gerakan Eliminasi TBC dan Cegah Stunting;
48. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 15);
49. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 476/Kep.84-Huk/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Tangerang Selatan;
50. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 18);
51. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola, Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, dan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 44);
52. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 46);
53. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 56);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONDOK AREN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445.1/003/2022 TENTANG PENETAPAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONDOK AREN.

- KESATU: : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren tentang Penetapan Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren;
- KEDUA : Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI: PONDOK AREN
PADA TANGGAL: 10 DESEMBER 2023
DIREKTUR,



Tulus Muladiyono



Lampiran:

**Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Pondok Aren**

Nomor : 400.7.1/4017/SK.20/RSUDPA/2023

**Tentang : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Pondok Aren Tentang Perubahan Atas Keputusan
Direktur Nomor 445.1/003/2022 Tentang
Penetapan Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Pondok Aren.**

PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONDOK AREN

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. Pelayanan IGD, IGD VK, dan IGD PONEK;
- d. Pelayanan Bedah Sentral, ICU, NICU, dan HCU;
- e. Pelayanan Kamar Bersalin;
- f. Pelayanan Farmasi;
- g. Pelayanan Radiologi dan Laboratorium;
- h. Pelayanan Ambulance;
- i. Pelayanan Pemulasaran Jenazah; dan
- j. Pelayanan Pengaduan/Humas dan Administrasi.



Tulus Muladiyono